



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

Gedung Keuangan Negara Surabaya I, Jalan Indrapura 5 Surabaya 60175
Telepon: (031)3523093-96, Faksimil : (031) 3558640
Website: www.djpbn.kemenkeu.go.id/kanwil/jatim/id

Nomor : S- 3951/WPB.16/BD.04/2018

14 November 2018

Sifat : Segera

Lapiran : Satu Buku

Hal : Penyampaian Kajian Fiskal Regional Jawa Timur
Triwulan III Tahun 2018

Yth. Direktur Jenderal Perbendaharaan

c.q. Direktur Pelaksanaan Anggaran

Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2 -4

Jakarta

Bersama ini disampaikan Kajian Fiskal Regional Jawa Timur Triwulan III Tahun 2018 yang didalamnya antara lain memuat perkembangan indikator pembangunan maupun indikator makroekonomi regional serta perkembangan pelaksanaan anggaran pusat dan daerah di Jawa Timur pada periode sampai dengan Triwulan III Tahun 2018, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-61/PB/2017.

Softcopy laporan hasil kajian dimaksud kami kirimkan melalui surel ke alamat: lo.ditpa@gmail.com.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,

Ludiro

Tembusan :

Direktur Jenderal Perbendaharaan, Jakarta



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

KAJIAN FISKAL REGIONAL



Triwulan III
2018

Penyusun:

Penanggung Jawab: Ludiro II Ketua Tim: Heru Kutanto I Editor: Bagus Jatmiko I
Desain Grafis: Arni Widijamitry I Anggota: Eko Purwanto I
Isti Wahjuli I Nunuk Hindriastutik I Meri Nurami I Surini I Indah Sridiyastuti I
Ali Purboyo I Andhi Wahyudianto I Albertin Upa I Praptingdyah N. I

KANWIL DJEN
PERBENDAHARAAN
PROVINSI JAWA TIMUR

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
I. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL.....	1
A. Produk Domestik Regional Bruto.....	1
B. Inflasi.....	1
C. Indikator Kesejahteraan.....	3
II. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN.....	5
A. Pendapatan Negara.....	6
B. Belanja Negara.....	9
C. Prognosis Realisasi APBN.....	12
III. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD.....	13
A. Pendapatan Daerah.....	14
B. Belanja Daerah.....	17
C. Prognosis Realisasi APBD Sampai Akhir Tahun 2018.....	19
IV. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)	20
V. BERITA / ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH.....	25
A. KPP Madya Optimis Tembus Target	25
B. Dongkrak Perolehan Pajak Dengan Layanan Digital.....	25

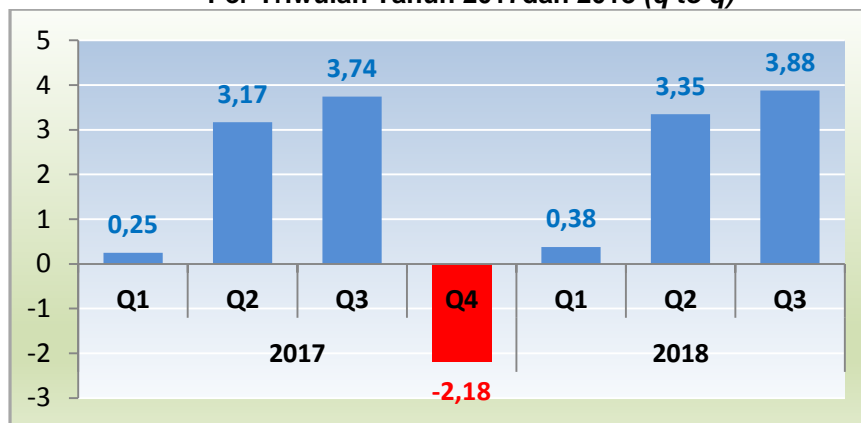
I. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL

A. Produk Domestik Bruto

Perekonomian Jawa Timur triwulan III-2018 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp569,39 triliun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan mencapai Rp403,68 triliun. Ekonomi Jawa Timur triwulan III-2018 tumbuh sebesar 5,40 persen, melambat bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (*y-to-y*), yakni sebesar 5,59 persen. Sedangkan secara *q-to-q* pertumbuhan ekonomi jatim naik menjadi 3,88 persen pada triwulan III dibandingkan triwulan II tahun 2018 sebesar 3,35 persen. Dari sisi produksi, semua lapangan usaha mengalami pertumbuhan.

Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha konstruksi sebesar 6,45 persen, diikuti Industri Pengolahan sebesar 5,21 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi Komponen Pengeluaran Ekspor Luar Negeri sebesar 14,22 persen Transportasi dan Pergudangan sebesar 8,23 persen.

Grafik 1.1 Pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Timur Per Triwulan Tahun 2017 dan 2018 (*q to q*)

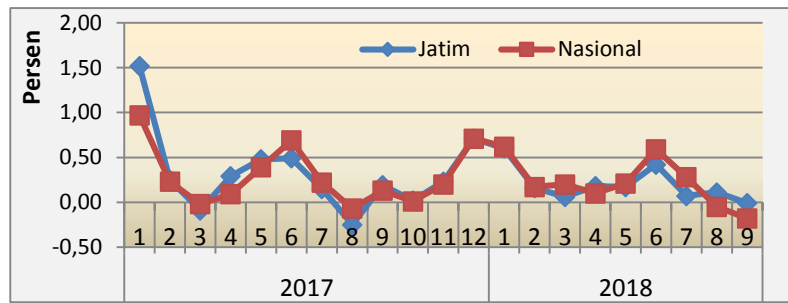


Sumber: BPS

B. Inflasi

Inflasi di Jawa Timur Tahun 2018 mengalami kenaikan. Pada Triwulan III-2018 puncak inflasi terjadi pada bulan Agustus 2018 yakni sebesar 0,11 persen. Angka inflasi bulan Agustus 2018 tersebut juga lebih tinggi dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun 2017, dimana pada bulan Agustus 2017 terjadi deflasi sebesar 0,25 persen.

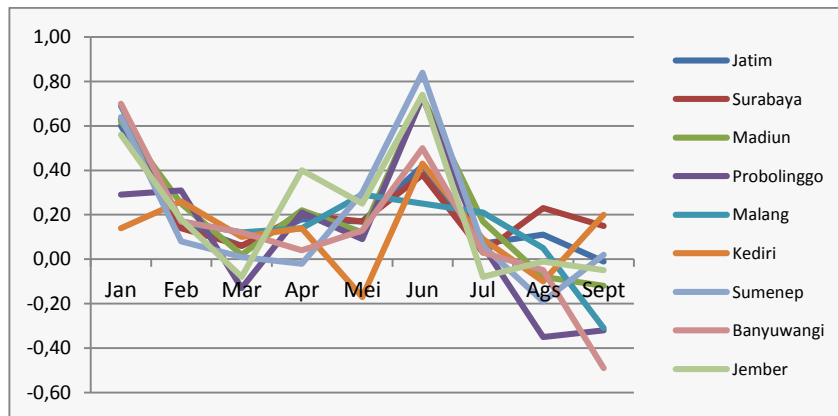
Grafik 1.2 Tingkat Inflasi Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2017 dan 2018



Sumber: BPS

Hampir seluruh kelompok pembentuk Indeks Harga Konsumen (IHK) menjadi penyumbang angka inflasi di Jawa Timur pada triwulan III-2018. Namun, pada bulan September 2018 terjadi deflasi sebesar 0,01 persen.

Grafik 1.3 Tingkat Inflasi 8 Kota dan Jawa Timur Tahun 2018



Sumber: BPS

Pada bulan Juli 2018 Jawa Timur mengalami inflasi sebesar 0,07 persen. Inflasi terjadi hampir di seluruh kota di Jawa Timur. Kota Malang memiliki angka inflasi paling tinggi yaitu 0,21 persen sedangkan deflasi terjadi di Jember sebesar 0,08 persen. Komoditas utama yang memberikan andil terbesar terjadinya inflasi adalah kelompok bahan makanan. Inflasi bulan Juli 2018 ini terutama dipengaruhi oleh naiknya harga BBM non subsidi yang berlaku mulai tanggal 1 Juli 2018.

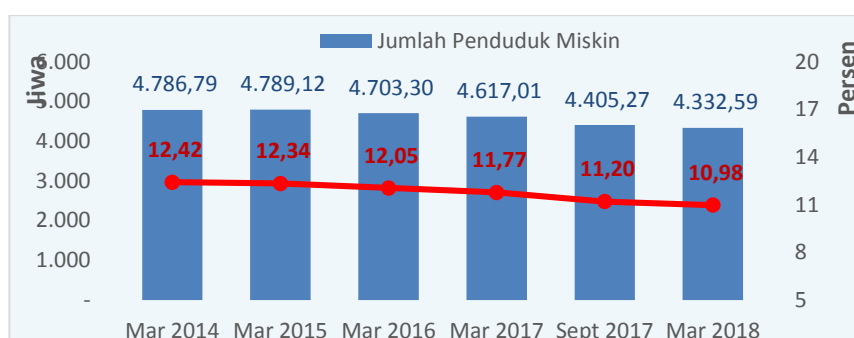
Pada bulan Agustus 2018 Jawa Timur mengalami inflasi sebesar 0,11 persen, lebih tinggi bila dibandingkan dengan Juli 2018. Kota Surabaya memiliki angka inflasi paling tinggi yaitu 0,23 persen, sedangkan deflasi tertinggi terjadi di Kota Probolinggo sebesar 0,35 persen. Salah satu hal yang menyebabkan inflasi di bulan Agustus 2018 ini adalah naiknya biaya akademis tingkat dasar hingga tingkat menengah.

Bulan September 2018 di Jawa Timur terjadi deflasi sebesar 0,01 persen. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Kediri yaitu 0,20 persen. Deflasi tertinggi terjadi di Banyuwangi sebesar 0,49 persen. Terdapat komoditi yang menghambat laju inflasi sehingga terjadi deflasi pada bulan September 2018. **Penurunan harga daging dan telur ayam ras, serta turunnya tarif angkutan udara menjadi pendorong utama deflasi pada bulan ini.**

C. Indikator Kesejahteraan

Secara umum tingkat kemiskinan di Jawa Timur dalam kurun waktu Maret 2014 s.d. Maret 2018 terus mengalami penurunan. Jumlah penduduk miskin juga terus turun pada bulan Maret 2018.

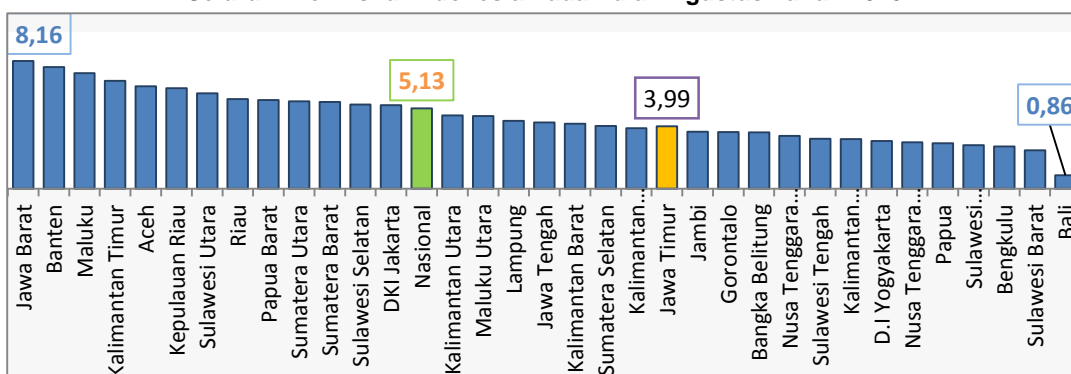
Grafik1.4 Tingkat Kemiskinan Jawa Timur Tahun 2014-2018



Sumber: BPS

Penurunan tingkat kemiskinan di provinsi Jawa Timur disebabkan antara lain turunnya tingkat inflasi, meningkatnya kemampuan daya beli masyarakat dan berkurangnya tingkat pengangguran terbuka. Penurunan selama satu semester tersebut ditunjukkan dengan turunnya jumlah penduduk miskin sebesar 72,68 ribu jiwa yang semula berjumlah 4.405,27 ribu jiwa pada September 2017 menjadi 4.332,59 ribu jiwa pada Maret 2018.

Grafik 1.5 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Seluruh Provinsi di Indonesia Pada Bulan Agustus Tahun 2018

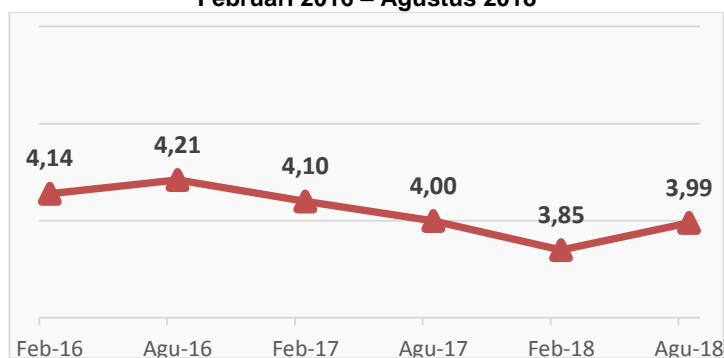


Sumber: BPS

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Timur bulan Agustus 2018 adalah sebesar 3,99 persen. Bila dibandingkan dengan provinsi-provinsi besar di Indonesia, Jawa Timur memiliki Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terendah, bahkan lebih rendah bila dibandingkan dengan TPT tingkat nasional sebesar 5,34 persen.

Bila dibandingkan dengan bulan Februari 2018, kenaikan TPT di bulan Agustus 2018 ini disebabkan antara lain pada bulan **Agustus merupakan bulan kelulusan sekolah baik tingkat menengah atas maupun tingkat pendidikan tinggi**. Sehingga dengan demikian para lulusan tersebut menyumbang angka pengangguran sebelum mendapatkan pekerjaan secara tetap.

**Grafik 1.6 Tingkat Pengangguran Terbuka Jawa Timur
Februari 2016 – Agustus 2018**



Sumber : BPS

Secara umum dalam kurun waktu 3 tahun, jumlah pekerja di sektor informal cenderung semakin menurun dan beralih ke sektor formal. Hal ini dapat menjadi indikasi semakin membaiknya perekonomian di Jawa Timur karena pangsa pasar kerja Sektor Formal mengalami kenaikan. Adapun fenomena meningkatnya pengangguran dan TPT pada bulan Agustus adalah hal yang biasa terjadi pada setiap tahun dimana bersamaan dengan bertambahnya jumlah angkatan kerja yang disebabkan **adanya kelulusan sekolah menengah maupun dari perguruan tinggi**.

II. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN

Perkembangan pelaksanaan APBN lingkup Provinsi Jawa Timur tahun 2018 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1 Pagu dan Realisasi APBN Lingkup Provinsi Jawa Timur s.d. Akhir Triwulan III Tahun 2017 dan Tahun 2018 (dalam miliar rupiah)

Uraian	Tahun 2017		Tahun 2018	
	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
A PENDAPATAN NEGARA	180.145,74	111.293,54	195.596,45	114.936,63
I. PENERIMAAN DALAM NEGERI	180.145,74	111.293,54	195.596,45	114.936,63
1. Penerimaan Pajak	176.207,79	105.377,61	187.276,81	109.332,20
2. PNBPN	3.937,95	5.915,94	8.319,65	5.604,43
II. HIBAH	-	-	-	-
B. BELANJA NEGARA	119.477,87	82.079,42	119.368,44	80.972,53
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	38.570,29	25.752,13	44.375,07	23.066,40
1. Belanja Pegawai	19.375,98	13.692,73	19.926,67	14.458,08
2. Belanja Barang	11.011,75	8.641,62	16.310,64	1.271,08
3. Belanja Modal	7.942,01	3.266,70	8.088,19	7.305,93
4. Belanja Bantuan Sosial	240,55	148,67	49,57	31,30
5. Belanja Lain-lain	-	-	-	-
II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	80.907,59	56.327,29	74.993,37	57.906,13
1. Transfer Ke Daerah	74.568,03	51.890,60	68.649,76	53.907,55
a. Dana Perimbangan	73.886,05	51.208,62	67.654,51	53.145,30
1) Dana Alokasi Umum	39.827,73	33.337,32	39.914,88	33.262,40
2) Dana Bagi Hasil	14.269,22	5.843,29	8.302,61	5.667,03
3) Dana Alokasi Khusus	19.789,10	12.028,02	19.437,02	14.215,87
i) DAK Fisik	5.006,53	2.418,88	3.779,00	2.100,20
ii) DAK Non Fisik	14.782,57	9.609,13	15.658,02	12.115,67
b. Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DI Yogyakarta, dan Dana Insentif Daerah	681,98	681,98	995,25	762,25
2. Dana Desa	6.339,56	4.436,69	6.343,61	3.998,59
C. SURPLUS/DEFISIT	60.667,87	29.214,12	76.228,01	33.964,10

Sumber: SPAN

Anggaran Pendapatan Negara lingkup Provinsi Jawa Timur tahun 2018 mengalami peningkatan 8,57 persen. Hal ini karena target Penerimaan Dalam Negeri yang mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp195,59 triliun. Secara keseluruhan Pagu Belanja Negara tahun 2018 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2017, namun belanja barang dan belanja modal mengalami kenaikan. Kenaikan belanja modal khususnya dikarenakan banyaknya proyek infrastruktur dilaksanakan di Jawa Timur yang mampu menyerap tenaga kerja banyak dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional.

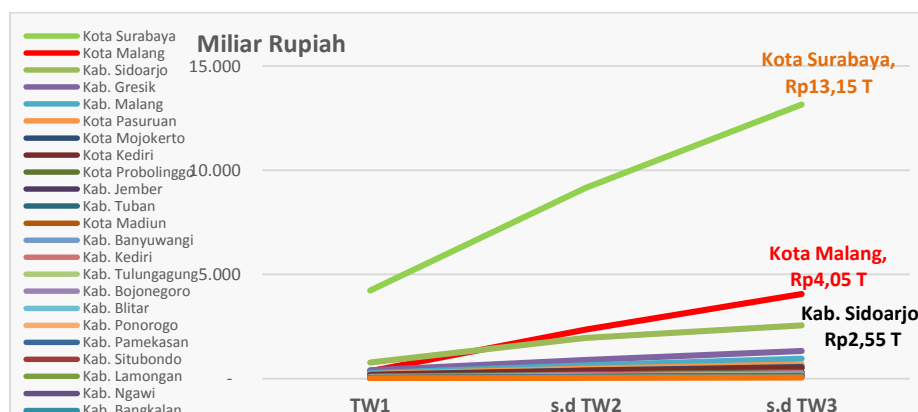
Pendapatan Negara

1. Penerimaan Perpajakan

a) Pajak Penghasilan (PPh)

Penerimaan PPh di seluruh Kota/Kabupaten lingkup Jawa Timur s.d. Triwulan III-2018 sebesar Rp26,79 triliun.

Grafik 2.1 Realisasi Penerimaan PPh Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 (dalam miliar Rupiah)



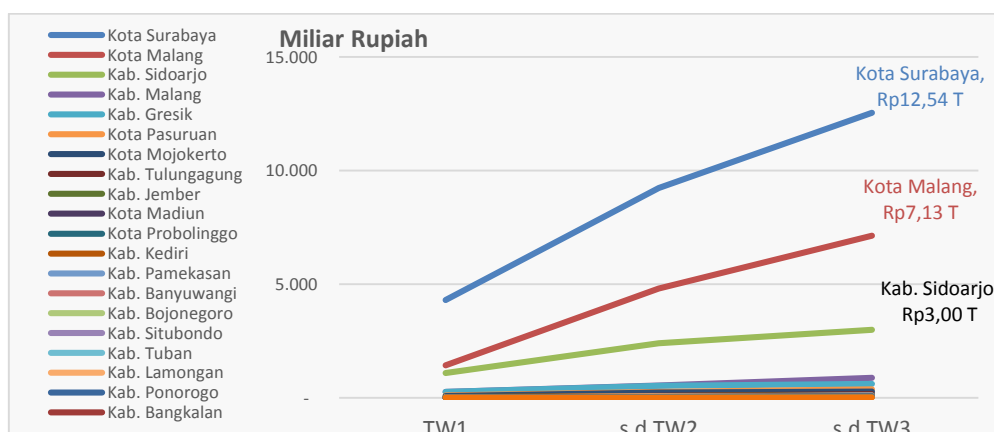
Sumber: SPAN

Kenaikan terbesar PPh di Kota Surabaya sebesar Rp13,15 triliun, disusul Kota Malang Rp4,05 triliun dan Kabupaten Sidoarjo Rp2,55 triliun. Kenaikan penerimaan PPh di Kota Malang dipengaruhi oleh ekspor emas hingga triwulan III. Namun, peningkatan penerimaan pajak penghasilan di ketiga kota besar tersebut tidak diikuti kenaikan secara signifikan oleh kota/kabupaten lain di Jawa Timur.

b) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Penerimaan PPN per kabupaten/kota adalah sebagai berikut :

Grafik 2.2 Realisasi Penerimaan PPN Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 (dalam Miliar Rupiah)



Sumber: SPAN

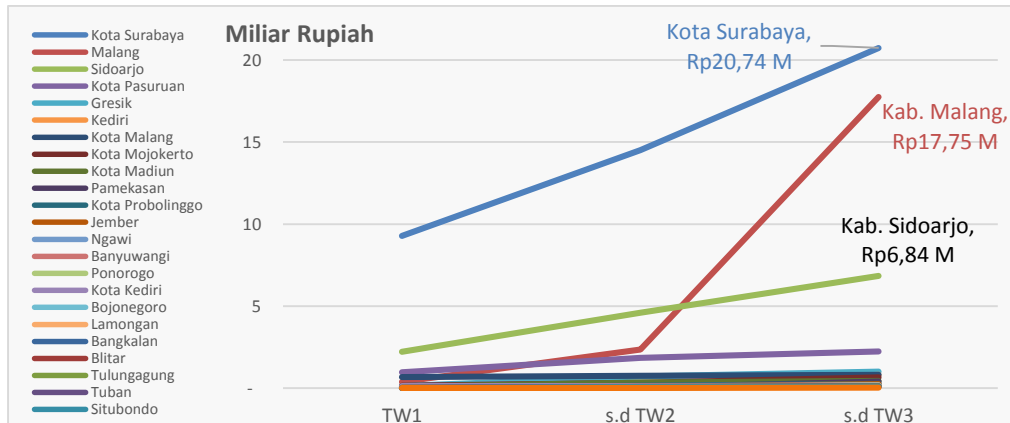
Penerimaan PPN s.d. Triwulan III-2018 adalah sebesar Rp26,38 triliun. Sebagaimana PPh, penerimaan PPN tertinggi juga dibukukan oleh 3 Kota besar, yaitu Kota Surabaya Rp12,54 triliun, Kota Malang Rp7,13 triliun dan Kabupaten Sidoarjo Rp3,00 triliun. Sedangkan kota lain lingkup provinsi Jawa

Timur mengalami kenaikan yang tidak signifikan (total penerimaan rata-rata kurang dari Rp1 triliun).

c) Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Penerimaan PPnBM per kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

Grafik 2.3 Realisasi Penerimaan PPnBM Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 (dalam Miliar Rupiah)



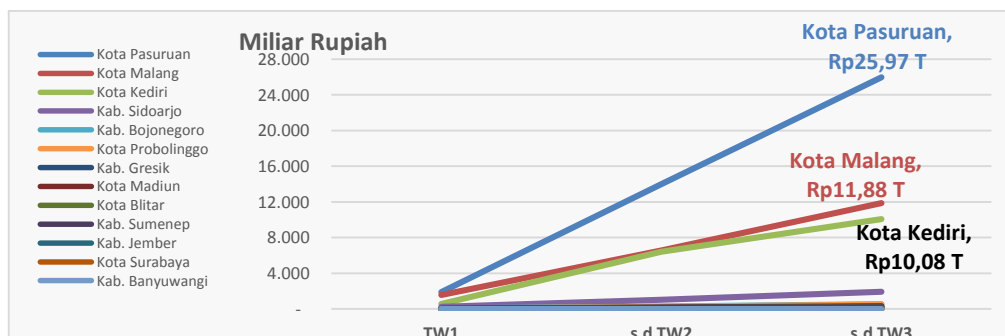
Sumber: SPAN

Total penerimaan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) s.d. Triwulan III-2018 Provinsi Jawa Timur sebesar Rp53,71 miliar. Angka penerimaan PPnBM tersebut disumbangkan secara dominan oleh Kota Surabaya, yaitu sebesar Rp20,74 miliar. Daerah lain yang menyumbang lebih dari satu miliar rupiah adalah Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Malang, Kabupaten Gresik dan Kota Pasuruan. Sedangkan kota/kabupaten lain mencatatkan angka penerimaan PPnBM dengan total kurang dari Rp1 miliar.

d) Penerimaan Cukai

e) Produksi atas barang-barang yang dikenakan tarif cukai meningkat tajam pada Triwulan III-2018 pada umumnya seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada Triwulan berkenaan.

Grafik 2.4 Realisasi Penerimaan Cukai Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 (dalam Miliar Rupiah)



Sumber: SPAN

Secara umum penerimaan Cukai s.d.Triwulan III-2018 di wilayah Provinsi Jawa Timur mengalami kenaikan yang tajam mencapai Rp51,79 triliun. Penerimaan Cukai pada triwulan III ini bahkan hampir setara dengan total penerimaan cukai triwulan I dan II tahun 2018. Keberhasilan Kanwil DJBC Provinsi Jatim dalam pemberantasan cukai ilegal di Jawa Timur sangat mempengaruhi peningkatan penerimaan negara dari cukai di tahun 2018. Penerimaan cukai terbesar dibukukan oleh Kota Pasuruan sebesar Rp25,97 triliun. **Sebagaimana diketahui Kota Pasuruan merupakan kota dengan industri rokok yang sangat besar (terdapat 17 industri rokok), disusul oleh Kota Malang dan Kota Kediri.**

“ Untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan WP, KPP Madya Sidoarjo terus berupaya meningkatkan fasilitas layanan yang nyaman. Dengan fasilitas komputer serta internet gratis semisal ada berkas yang kurang, tidak perlu kembali ke kantornya, mereka merasa nyaman tentu akan membayar pajak dengan baik”

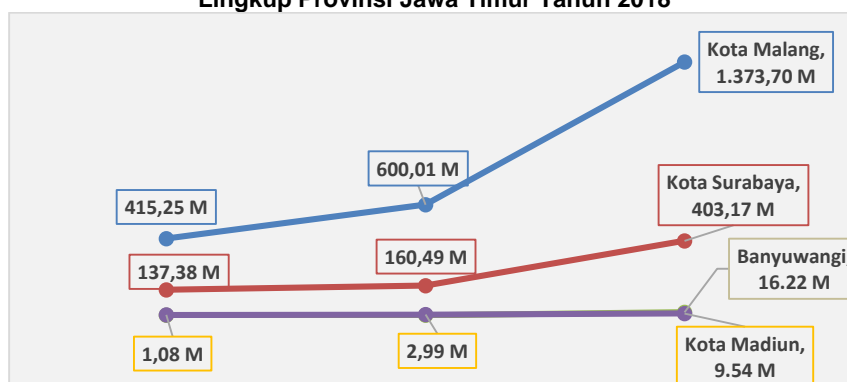
- Teguh Imam Wirotomo, Kepala KPP Madya Sidoarjo, Radar Sidoarjo-Jawa Pos, Jumat, 3 Agustus 2018

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak

a) Penerimaan PNBPN Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan

PNBP Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan yang dihasilkan oleh Satker Badan Layanan Umum (BLU) di Bidang Pendidikan pada Triwulan III-2018 di Jawa Timur sebesar Rp1.802,63 miliar.

Grafik 2.5 Realisasi PNBPN Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi Jawa Timur Tahun 2018



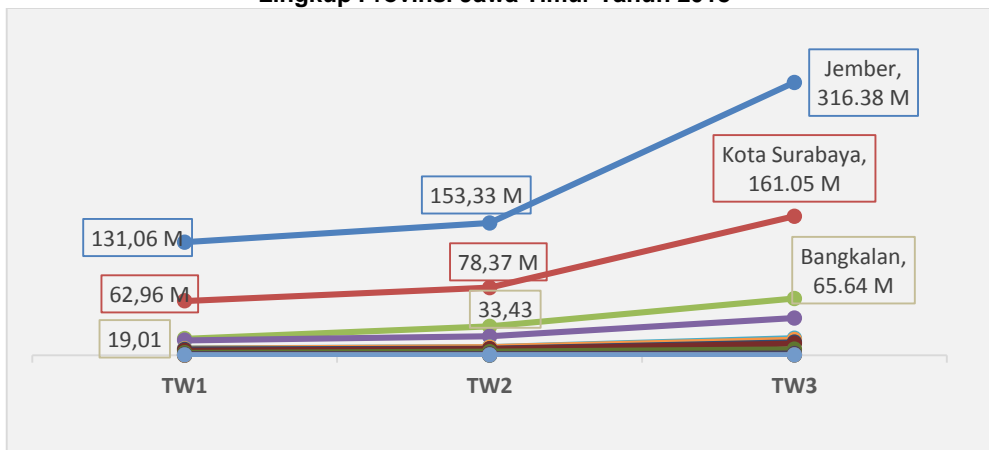
Sumber: SPAN

b) Penerimaan PNBPN Pendapatan Uang Pendidikan

Pendapatan Uang Pendidikan dihasilkan oleh satker yang mengurus bidang pendidikan di lingkup Jawa Timur s.d. Triwulan III-2018 sebesar

Rp661,1 miliar. Pendapatan ini meningkat pada triwulan III-2018 dikarenakan bertepatan dengan waktu seleksi masuk anak sekolah.

Grafik 2.6 Realisasi PNBP Pendapatan Uang Pendidikan Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi Jawa Timur Tahun 2018



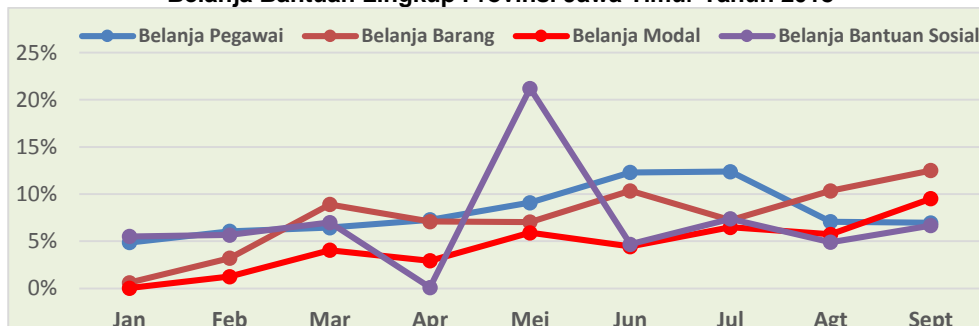
Sumber: SPAN

A. Belanja Negara

Belanja negara lingkup Provinsi dapat dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu:

1. Belanja Pemerintah Pusat

Grafik 2.7 Tren Realisasi Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Bantuan Sosial Lingkup Provinsi Jawa Timur Tahun 2018



Sumber : SPAN

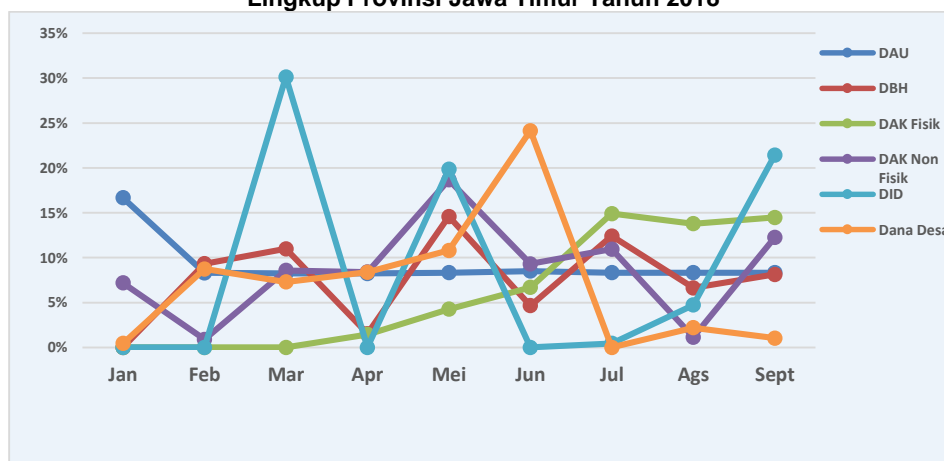
Total realisasi belanja pemerintah pusat s.d.Triwulan III Tahun 2018 adalah sebesar Rp23,07 triliun atau 51,98 persen dari total pagu belanja Rp44,38 triliun. Tren realisasi Belanja Pemerintah Pusat pada umumnya terus mengalami kenaikan hingga akhir bulan September 2018, sedangkan Belanja Bantuan Sosial mengalami penurunan pada bulan Agustus 2018, meskipun kembali mengalami kenaikan pada bulan September 2018.

2. Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Pagu total Dana Transfer ke Daerah Jawa Timur tahun 2018 adalah sebesar Rp68,65 triliun yang terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana

Alokasi Khusus Fisik, Dana Alokasi Khusus Nonfisik, dan Dana Intensif Daerah. Sedangkan pagu total Dana Desa adalah sebesar Rp6,34 triliun. Realisasi total Dana Transfer dan Dana Desa s.d. Triwulan III-2018 sebesar Rp57,91 triliun atau 77,22 persen dari total pagu. Terkecuali DAU yang relatif konstan, tren realisasi Dana Transfer dan Dana Desa terhadap pagu masing-masing s.d. Triwulan III-2018 beragam

Grafik 2.8 Tren Realisasi Dana Transfer dan Dana Desa Lingkup Provinsi Jawa Timur Tahun 2018



Sumber : SPAN

3. Pengelolaan BLU

Jumlah satker Badan Layanan Umum (BLU) di wilayah Provinsi Jawa Timur sebanyak 26 Satker BLU yang tersebar dalam 5 rumpun (Pendidikan, Kesehatan, Kawasan, Pengelolaan Dana, dan Lainnya). Hingga akhir triwulan III-2018 semua satker BLU tersebut telah menghasilkan pendapatan BLU total sebesar Rp2,45 triliun.

Tabel 2.2 Pendapatan BLU di Wilayah Jawa Timur Tahun 2017 dan 2018 (dalam miliar rupiah)

Uraian	2017		2018		% Realisasi
	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	
Pendapatan Jasa Layanan Umum	2.047,55	2.135,22	2.412,52	2.343,88	97,15
Pendapatan Hibah BLU	1,75	0,00	4,95	4,20	84,87
Pendapatan Hasil Kerjasama BLU	207,96	64,09	218,22	71,18	32,62
Pendapatan BLU Lainnya	38,99	31,70	66,26	35,03	52,87
Jumlah Penerimaan BLU	2.296,25	2.231,01	2.701,94	2.454,29	90,83

Sumber : OMSPAN

Pendapatan BLU s.d. akhir Triwulan III-2018 tersebut meningkat 1,1 persen bila dibandingkan dengan total pendapatan BLU s.d. akhir triwulan III-2017 yang berjumlah sebesar Rp2,23 triliun.

4. Manajemen Investasi Pusat

a. Pengelolaan Pinjaman kepada Pemerintah Daerah/BUMD

Debitur yang wajib melaksanakan rekonsiliasi dengan Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur untuk *outstanding* pinjaman per-30 Juni 2018 tersisa 4 Debitur dengan 5 pinjaman. Dua pinjaman telah dilunasi oleh debitur, sedangkan tiga pinjaman lainnya melalui proses *penghapusan bersyarat* oleh pemerintah yaitu pinjaman PDAM Kabupaten Malang, PDAM Kabupaten Nganjuk dan PDAM Kabupaten Sumenep dengan Hak Tagih Pemerintah keseluruhan sebesar Rp27,16 miliar.

Tabel 2.3 Posisi Pinjaman Pemdadan BUMD Posisi Per 30 Juni 2018

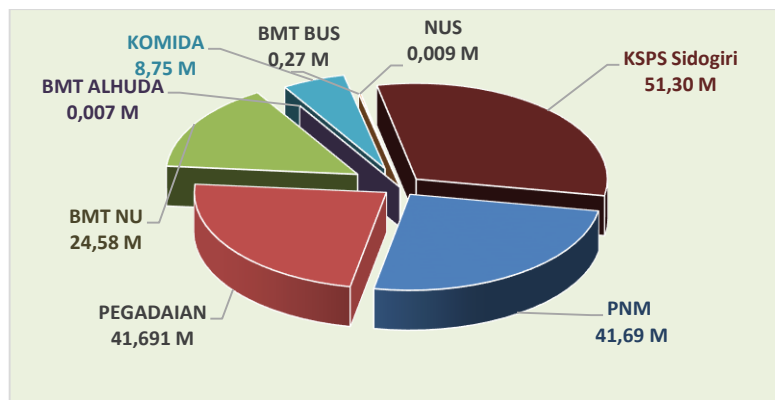
No	LOAN ID	DEBITUR	NPPP	KATEGORI	SUMBER DANA	REOG	Hak Tagih Pemerintah (Rp)
1	2091001	PDAM KAB MALANG	RDA-181/DP3/1994	BUMD	RPD	RESTRUKTURISASI PDAM (PMK-120)	5,910,832,897.38
2	2091201	PDAM KAB NGANJUK	RDA-225/DP3/1996	BUMD	RPD	RESTRUKTURISASI PDAM (PMK-120)	11,253,042,579.10
3	2092101	PDAM KAB SUMENEP	RDA.P5-130/DP3/1993	BUMD	RPD	RESTRUKTURISASI PDAM (PMK-114) PUPN	9,999,994,546.13
4	2093701	PDAM KOTA SURABAYA	SLA-740/DP3/1994	BUMD	SLA	LUNAS	-
5	2093801	PDAM KOTA SURABAYA	SLA-766/DP3/1994	BUMD	SLA	LUNAS	-

Sumber: KPPN Khusus Investasi

b. Pembiayaan Kredit Ultra Mikro (UMi)

Pengelolaan investasi pemerintah lainnya adalah pembiayaan Kredit Ultra Mikro (UMi) oleh salah satu BLU Kementerian Keuangan yaitu Pusat Investasi Pemerintah (PIP).

Grafik 2.9 Penyaluran Kredit Ultra Mikro Per Lembaga Penyalur Di Jawa Timur s.d. Triwulan III-2018



Sumber Data : Dit. SMI posisi 30 September 2018

Jumlah Penyaluran UMi hingga akhir triwulan III-2018 sebesar Rp165,20 miliar tersebar di seluruh daerah di Jawa Timur, dengan debitur sebanyak 47.841 debitur

B. Prognosis Realisasi APBN

Tabel 2.2 Perkiraan Realisasi APBN Lingkup Provinsi Jawa Timur s.d. Triwulan IV Tahun 2018

(dalam Miliar Rupiah)

Uraian	Pagu	Realisasi s.d Triwulan III		Tahun 2018	
		Rp	% Realisasi Terhadap pagu	Rp	% Perkiraan Realisasi Terhadap pagu
Pendapatan Negara	195.596.453	114.936.625	58,76	191.312.009	97,81
Belanja Negara	119.368.444	80.972.528	67,83	113.610.256	95,18
Surplus/Defisit	76.228.010	33.964.097	44,56	73.168.729	95,99

Sumber : SPAN

Prognosis dilakukan berdasarkan realisasi APBN-2017 sampai dengan akhir tahun. Perkiraan realisasi pendapatan negara s.d. akhir tahun 2018 adalah sebesar Rp 191.312,01 triliun atau 97,81 persen dari pagu pendapatan yang ditetapkan Rp195,59 triliun. Faktor yang dapat mempengaruhi peningkatan pendapatan negara s.d.Triwulan IV-2018 adalah bahwa pertumbuhan ekonomi Jawa Timur diproyeksikan terus meningkat dibandingkan pada Triwulan III-2018 (*q-q*). Belanja negara juga diperkirakan akan mengalami peningkatan s.d. akhir tahun 2018 sebesar Rp113,61 triliun atau sebesar 95,18 persen. Belanja negara yang diperkirakan lebih dari 90 persen ini diharapkan mampu terus mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Provinsi Jawa Timur.

III. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD

APBD merupakan salah satu mesin pendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Selain itu, APBD juga sebagai salah satu penentu tercapainya target dan sasaran makro ekonomi daerah yang diarahkan untuk mengatasi berbagai kendala dan permasalahan pokok yang merupakan tantangan dalam mewujudkan agenda pemerintah untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan mandiri.

**Tabel 3.1 Realisasi APBD Lingkup Provinsi Jawa Timur
s.d. Akhir Triwulan III Tahun 2017 dan Tahun 2018**

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2017		Tahun 2018	
	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
PENDAPATAN	111.301.685.104.300	82.610.594.822.002	116.137.615.231.320	88.817.291.235.749
PAD	31.225.257.816.764	24.370.665.815.724	33.001.821.994.652	26.330.395.206.794
Pajak Daerah	19.581.383.648.199	16.261.678.183.496	21.029.738.969.856	17.649.631.933.909
Retribusi daerah	1.541.329.209.451	1.071.438.019.218	1.471.642.317.168	959.135.085.133
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	809.714.149.959	744.911.055.882	822.107.406.250	776.094.938.102
Lain-lain PAD yang sah	9.292.830.809.155	6.292.638.557.129	9.678.333.301.377	6.945.533.249.650
Pendapatan Transfer	79.040.431.592.277	57.367.030.987.198	79.619.201.286.998	61.792.940.635.277
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	66.684.398.023.321	48.191.710.735.194	66.230.313.375.578	52.731.858.478.666
Dana Bagi Hasil Pajak	4.511.253.433.117	3.128.796.927.957	5.520.442.738.689	2.500.636.618.021
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	2.066.209.865.950	1.542.348.305.495	2.016.712.658.889	3.904.776.995.700
Dana Alokasi Umum	40.482.280.459.986	31.184.963.947.438	39.994.653.581.000	32.402.512.698.925
Dana Alokasi Khusus	18.395.680.125.096	11.489.778.550.044	18.698.504.397.000	13.923.932.166.020
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	6.696.327.829.000	4.641.584.214.182	7.687.838.001.730	4.517.681.230.679
Dana Otonomi Khusus	842.484.510.000	478.869.493.544	1.106.022.180.000	455.650.015.549
Dana Intensif Daerah	15.000.000.000	15.000.000.000	-	140.125.000.000
Dana Penyesuaian	4.965.463.739.000	3.556.274.413.567	5.365.183.517.730	3.138.853.092.480
Dana Desa	705.886.983.000	490.944.749.071	1.216.632.304.000	783.053.122.650
Transfer Pemerintah Provinsi	5.245.999.543.956	4.533.736.037.822	5.204.451.067.190	3.732.417.556.797
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.156.745.877.376	4.070.005.847.850	5.168.128.645.649	3.616.443.352.457
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	89.253.666.580	95.116.723.972	36.322.421.541	115.974.204.340
Transfer Bantuan Keuangan	413.706.196.000	368.613.466.000	496.598.842.500	810.983.369.135
Lain-lain Pendapatan daerah yang sah	1.035.995.695.259	872.898.019.079	3.516.591.949.670	693.955.393.678
Pendapatan Hibah	248.829.095.114	135.050.065.089	2.366.565.350.174	487.747.246.613
Pendapatan Dana Darurat	244.245.613.000	191.996.826.655	-	-
Pendapatan Lainnya	542.920.987.145	545.851.127.335	1.150.026.599.496	206.208.147.065
BELANJA	106.802.228.551.506	53.842.734.343.732	110.416.371.253.819	62.335.307.879.137
Belanja Pegawai	43.140.045.510.829	25.314.495.736.054	44.270.430.812.940	26.481.060.264.477
Belanja Barang	25.356.639.118.474	11.845.613.817.638	28.689.958.134.650	16.354.241.405.663
Belanja Bunga	9.913.895.772	5.779.520.671	7.889.431.682	5.690.730.152
Belanja Subsidi	51.453.451.800	1.540.462.300	169.962.135.600	156.226.625.800
Belanja Hibah	9.700.496.176.028	6.060.130.777.795	10.863.804.812.338	6.976.846.813.891
Belanja Bantuan sosial	548.706.072.842	202.586.959.318	672.546.362.570	307.376.783.910
Belanja Bantuan Keuangan	6.725.476.882.567	4.015.664.194.881	8.474.145.287.015	4.922.350.900.338
Belanja Modal	20.978.536.666.517	6.323.777.249.345	17.086.143.119.533	7.072.020.100.241
Belanja Tidak Terduga	290.960.776.678	73.145.625.729	176.563.875.492	59.494.254.665
TRANSFER PEMERINTAH DAERAH	10.701.365.642.744	8.123.364.704.281	10.723.162.439.161	11.761.628.247.764
Transfer/Bagi Hasil Kedesa	5.471.422.730.894	4.442.285.025.915	8.390.201.136.491	4.293.862.095.916
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	5.402.651.485.542	4.425.973.379.222	5.784.385.000.889	4.042.072.985.586
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	68.771.245.353	16.311.646.693	2.605.816.135.602	251.789.110.330
Transfer Bantuan Keuangan	5.233.042.911.850	3.681.079.678.366	2.332.961.302.670	7.467.766.151.848
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	1.829.717.907.662	1.181.018.277.851	-	1.875.561.401.124
Transfer Dana Desa	327.672.300.017	221.533.475.879	-	5.346.397.892.246
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	3.075.652.704.171	2.278.527.924.636	2.332.961.302.670	245.806.858.478
Belanja dan Transfer	117.503.594.194.250	61.966.099.048.013	120.592.425.273.690	69.174.585.226.563
Surplus / Defisit	(6.201.909.089.950)	20.644.495.773.989	(4.454.810.042.370)	19.642.706.009.184

Sumber : LRA Jatim Pemprov/Kab/Kota (data diolah)

Berdasarkan tabel di atas, APBD Provinsi Jawa Timur tahun 2018 meningkat dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 4,34 persen atau sebesar Rp116.137,61 miliar. Realisasi pendapatan daerah sampai dengan Triwulan III-2018 sebesar Rp88.817,29 miliar atau sebesar 76,48 persen dari pagu, dengan penyumbang terbesar dari pendapatan transfer, yaitu sebesar 61.792,94 miliar atau sebesar 69,57 persen dari total realisasi

pendapatan. Sedangkan pagu Belanja Daerah tahun 2018 sebesar Rp110.416,37 miliar mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2017 yang sebesar Rp106.802,23 miliar. Realisasi belanja daerah sampai dengan Triwulan III-2018 juga mengalami kenaikan, yaitu Rp 62.335,31 miliar, dibandingkan dengan belanja daerah pada Triwulan III-2017 yang sebesar Rp53.842,73 miliar. Sampai dengan Triwulan III-2018 APBD lingkup Provinsi Jawa Timur mengalami surplus sebesar Rp19.642,71 miliar.

A. Pendapatan Daerah

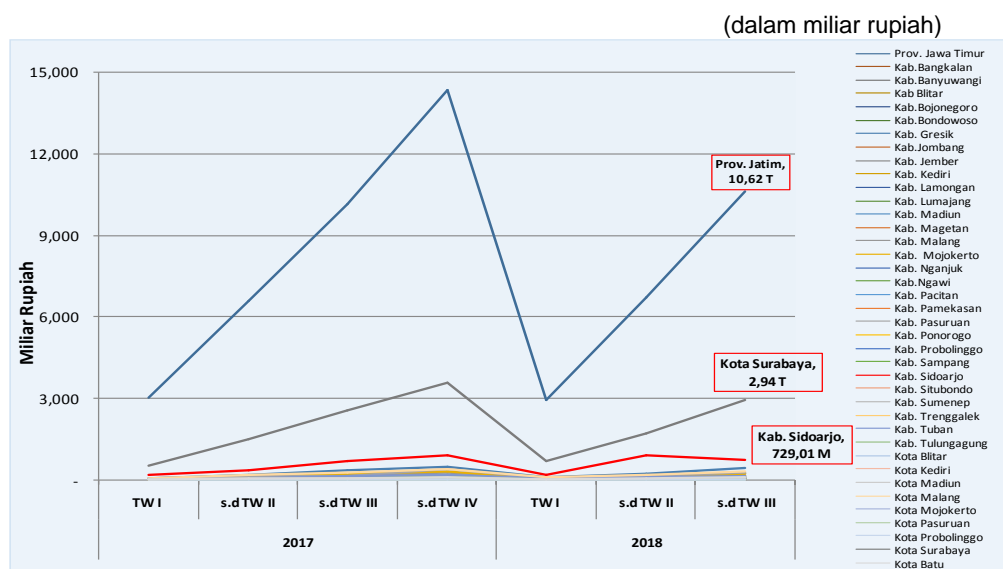
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Meliputi PAD agregat seluruh Pemda Jawa Timur berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

a) Penerimaan Pajak Daerah

Jumlah pajak daerah yang berhasil dihimpun Jawa Timur sampai dengan periode Triwulan III-2018 sebesar Rp17.649,63 miliar atau 83,93 persen dari perkiraan targetnya sebesar Rp21.029,74 miliar dan jika dibandingkan dengan Triwulan III-2017 (y-y) mengalami kenaikan sebesar 7,86 persen. Hingga periode ini Pemerintah Provinsi Jawa Timur merupakan penghimpun pajak daerah terbesar sebesar Rp10.620,97 miliar jika dibandingkan dengan daerah lainnya di Provinsi Jawa Timur yang disusul oleh Kota Surabaya Rp2.939,93 miliar dan Kabupaten Sidoarjo Rp729.010,82 miliar.

Grafik 3.1 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi Jawa Timur s.d Triwulan III-2018



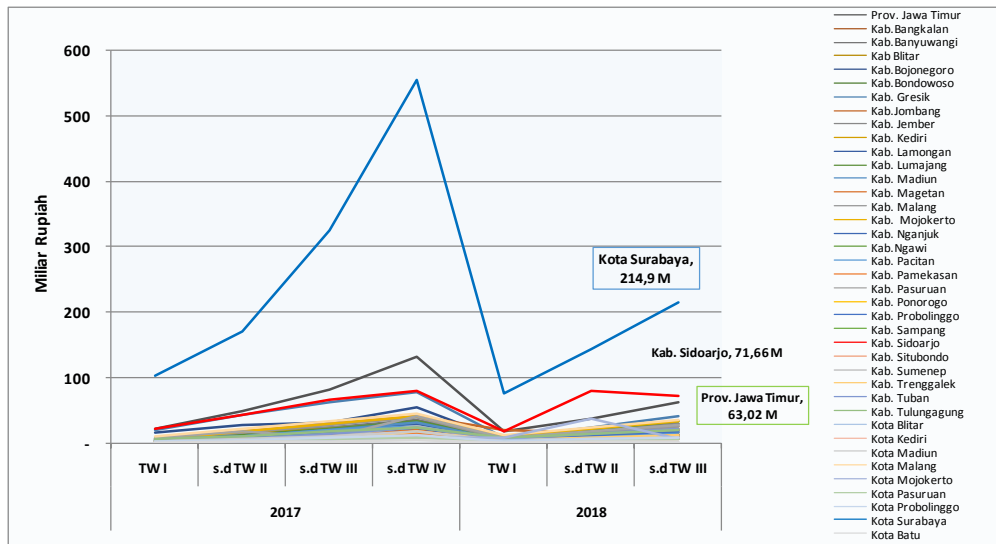
Sumber : LRA Jatim Pemprov/Kab/Kota

b) Penerimaan Retribusi Daerah

Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah di Jawa Timur hingga periode Triwulan III-2018 tercatat sebesar Rp959,13 miliar. Jumlah tersebut mencapai 65,17

persen dari target penerimaan pada APBD sebesar Rp1.471,64 miliar. Kontribusi terbesar terhadap penerimaan Retribusi Daerah adalah Kota Surabaya sebesar Rp214,9 miliar. Sebagian besar daerah di Jawa Timur hanya menerima PAD dari Retribusi Daerah dengan jumlah yang kurang signifikan, dibawah rata-rata Jawa Timur yang sebesar Rp63,02 miliar.

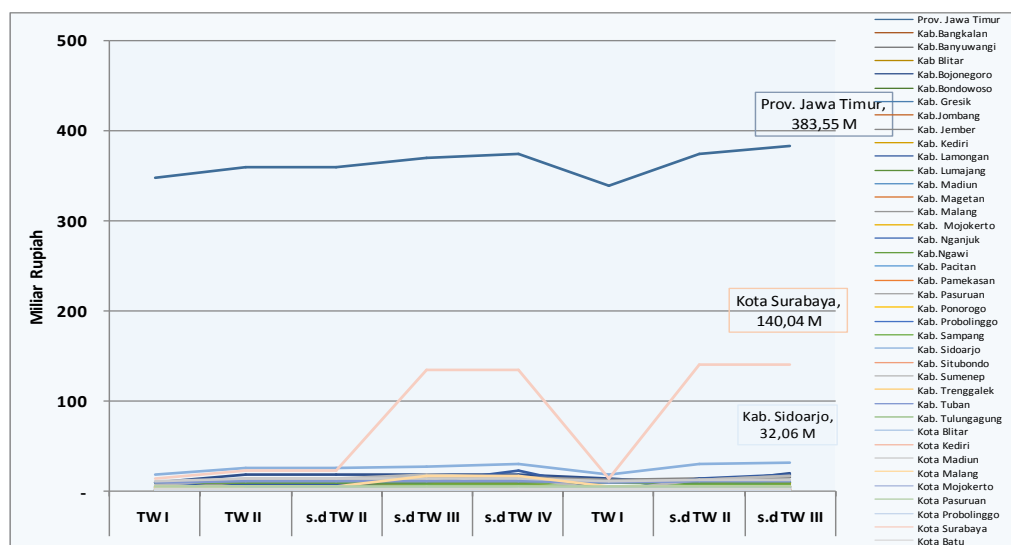
Grafik 3.2 Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi Jawa Timur Triwulan III-2018



Sumber : LRA Jatim Pemprov/Kab/Kota

c) Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Grafik 3.3 Realisasi Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi Jawa Timur Triwulan III- 2018



Sumber : LRA Jatim Pemprov/Kab/Kota

Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan yang masuk ke Kas daerah di Jawa Timur sampai dengan Triwulan III-2018 telah mencapai Rp776,09 miliar atau 94,40 persen dari target sebesar Rp822,11 miliar. Penyumbang terbesar Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan untuk Triwulan III-2018 adalah Pemerintah Provinsi yang mencapai Rp383,55 miliar atau mencapai 49,42 persen dari total penerimaan, disusul Kota Surabaya, dan Kabupaten Sidoarjo.

Dari data diatas, realisasi PAD sampai dengan Triwulan III-2018 dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2017 naik sebesar 8,04 persen, atau naik dari Rp24.370,66 miliar menjadi Rp26.330,39 miliar. Tingkat kemandirian keuangan daerah berdasarkan rasio PAD terhadap total pendapatan daerah di Jawa Timur sebesar 29,64 persen dan Pajak Daerah masih menjadi sumber PAD terbesar, yaitu sebesar 67,03 persen dari total PAD. Oleh karena itu, diperlukan inovasi ataupun terobosan baru dalam meningkatkan sumber PAD yang lain oleh Pemerintah Daerah.

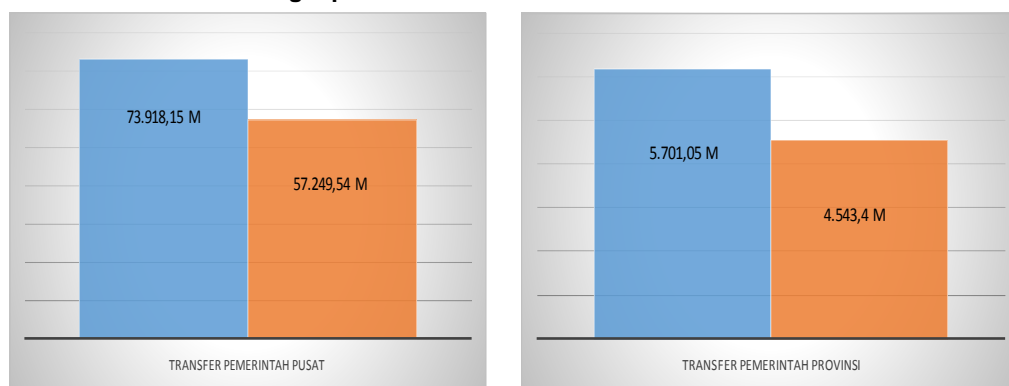
" Terhitung mulai awal Agustus 2018, target pendapatan dari retribusi parkir sudah mencapai 76 persen atau sekitar Rp 1 miliar. Sejak tahun lalu, Dishub sudah membuat terobosan-terobosan untuk mencapai target pendapatan parkir. Mulai gencar melakukan razia, menertibkan jukir yang menunggak uang setoran parkir, hingga penerapan karcis parkir berhadiah. Hasilnya, Dishub memenuhi target pendapatan retribusi parkir pada 2017. "

- Kepala Dinas Perhubungan Kota Blitar, Priyo Suhartono, Suryamalang.com, 2 September 2018 -

2. Pendapatan Transfer

Realisasi pendapatan transfer agregat seluruh Pemda di Jawa Timur (provinsi/kabupaten/kota) berupa transfer dana pemerintah pusat (transfer dana perimbangan dan transfer pemerintah pusat lainnya) mencapai Rp57.249,54 miliar, sementara transfer pemerintah provinsi (DBH) dan transfer bantuan keuangan sebesar Rp4.543,40 miliar.

Grafik 3.4 Pagu dan Realisasi Penyerapan Dana Transfer Lingkup Provinsi Jawa Timur s.d. Triwulan III-2018



Sumber : LRA Jatim Pemprov/Kab/Kota

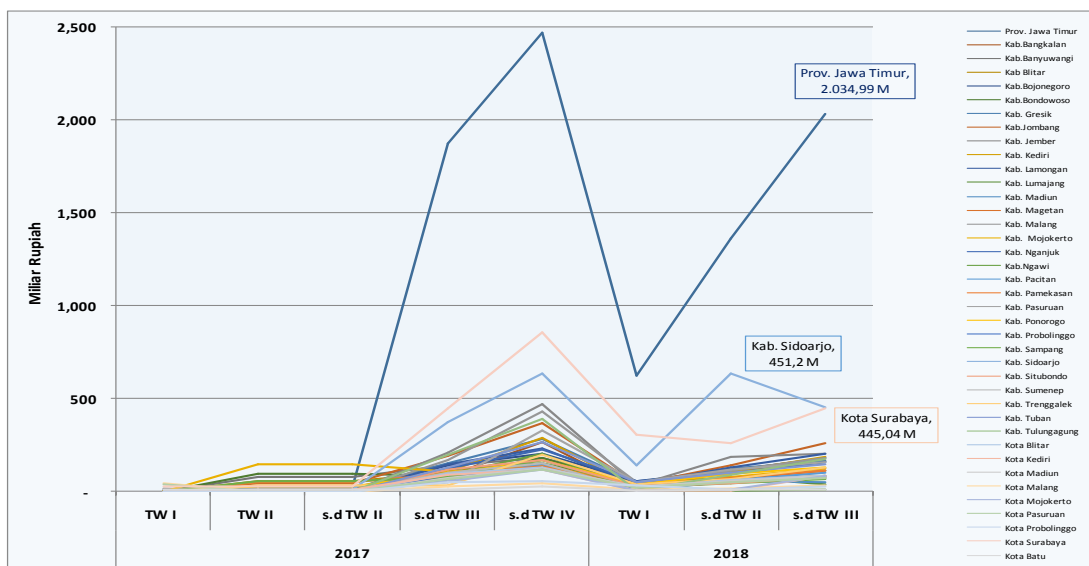
Realisasi DAU sampai dengan Triwulan III-2018 mencapai Rp32.402,51 miliar, masih mendominasi 61,45 persen dari total realisasi transfer pemerintah pusat-dana perimbangan sebesar Rp52.731,86 miliar. Realisasi DAK sampai dengan Triwulan III-2018 mengalami kenaikan dari Rp11.489,78 miliar menjadi Rp13.923,93 miliar atau naik 21,19 persen dibandingkan tahun 2017 pada periode yang sama. Demikian juga realisasi Dana Desa yang naik sebesar 59,50 persen dibandingkan Triwulan III-2017 atau menjadi sebesar Rp783,05 miliar sampai dengan Triwulan III-2018. Realisasi transfer DBH Pajak sampai dengan Triwulan III-2018, sebesar Rp2.500,64 miliar atau 45,30 persen dari pagu.

“Yang jelas, adanya perolehan DBH migas triwulan I, II dan III itu APBD 2018 aman.”
 - Kepala Badan Pendapatan Daerah Pemkab Bojonegoro Herry Sudjarwo,
 Antaranews Jatim, 9 Juli 2018 -

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah pada seluruh Pemerintah Daerah Jawa Timur (provinsi/kabupaten/kota) berupa pendapatan hibah dan pendapatan lainnya.

Grafik 3.5 Pagu dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Lingkup Provinsi Jawa Timur Triwulan III Tahun 2017-2018 (y-y)



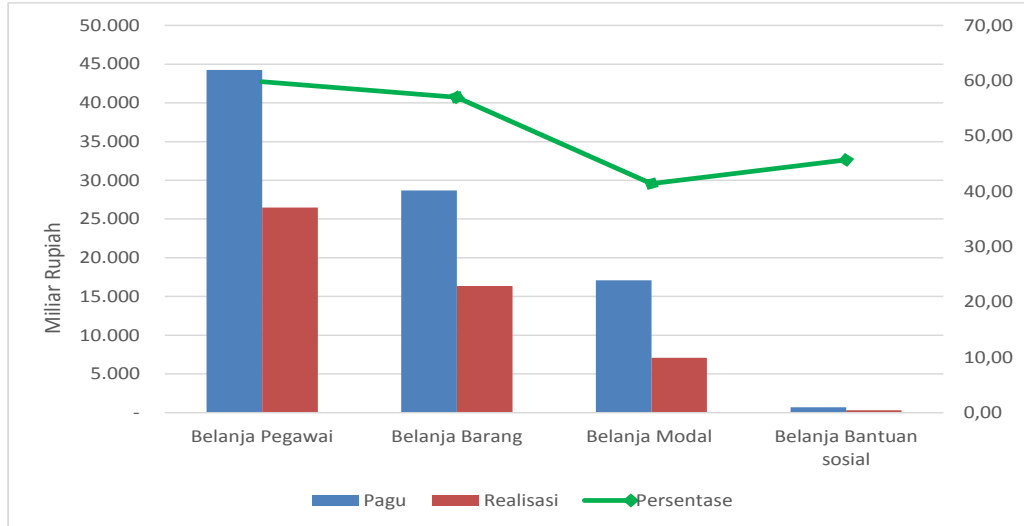
Sumber : LRA Jatim Pemprov/Kab/Kota

Pagu lain-lain pendapatan daerah yang sah pada tahun 2018 naik hingga lebih dari 239,44 persen. Realisasi sampai dengan Triwulan III-2018, pendapatan hibah mencapai Rp487,75 miliar atau naik signifikan sebesar 261,16 persen dibandingkan Triwulan III-2017, sementara pendapatan lainnya sampai dengan Triwulan III-2018 mencapai Rp1.150,03 miliar.

B. Belanja Daerah

1. Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal

Grafik 3.6 Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal Lingkup Provinsi Jawa Timur s.d Triwulan III-2018



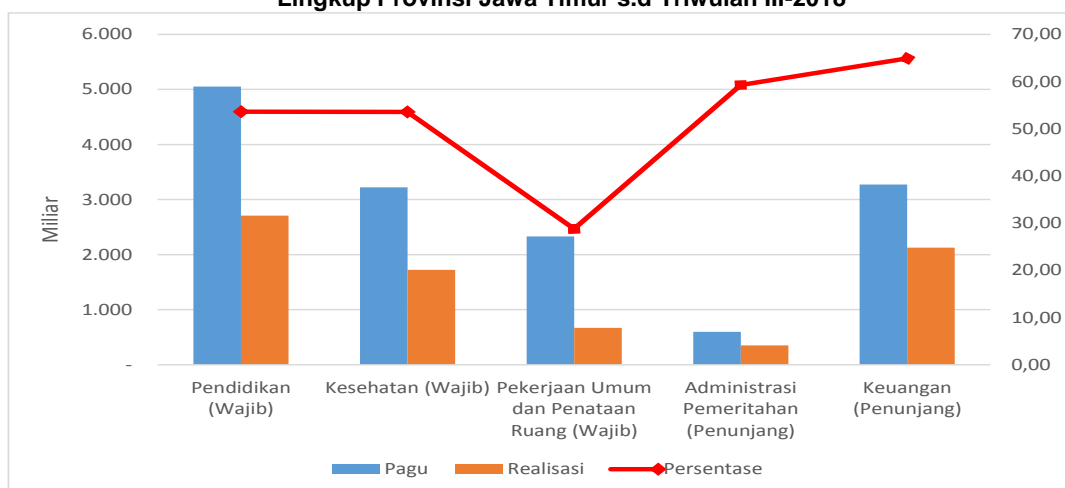
Sumber : LRA Jatim Pemprov/Kab/Kota

Alokasi untuk Belanja Pegawai oleh Pemerintah Daerah di Jawa Timur masih mendominasi pagu belanja pada APBD tahun 2018. Dengan nilai pagu sebesar Rp44.270,43 miliar, sampai dengan Triwulan III-2018 realisasi belanja pegawai sebesar Rp26.481,06 miliar atau 59,82 persen dari pagu. Sementara capaian realisasi Belanja Barang sebesar 57 persen dan Belanja Modal 41,39 persen serta Belanja Bantuan Sosial sebesar 45,70 persen dari total pagu tiap jenis belanja.

2. Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Urusan

Belanja APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, dihimpun berdasarkan data dari delapan kabupaten/kota di Jawa Timur, yaitu Blitar, Bojonegoro, Gresik, Pamekasan, Sidoarjo, Tulungagung, Kota Blitar dan Kota Pasuruan. Belanja yang memiliki pagu tertinggi adalah Pendidikan (34,90 persen), disusul Keuangan (22,62 persen), Kesehatan (22,26 persen), Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (16,09 persen), dan Administrasi Pemerintahan (4,12 persen) dari total pagu sebesar Rp14.478,18 miliar. Realisasi sampai dengan Triwulan III-2018 mencapai Rp7.586,97 miliar atau 52,40 persen dari total pagu.

Grafik 3.6 Pagu dan Realisasi Belanja Berdasarkan Urusan (Lima Urusan Tertinggi) Lingkup Provinsi Jawa Timur s.d Triwulan III-2018



Sumber : LRA Jatim Pemprov/Kab/Kota

C. Prognosis Realisasi APBD sampai dengan Akhir Tahun 2018

Hasil perkiraan pendapatan daerah dan belanja daerah Jawa Timur dipengaruhi oleh berbagai kebijakan fiskal diantaranya kebijakan yang tetap memprioritaskan transfer ke daerah dan dana desa, DAK dan Dana Desa akan didorong terus untuk menjadi instrumen pertumbuhan ekonomi daerah, sekaligus menyamakan prioritas daerah atau membuat sinkronisasi antara prioritas daerah dan prioritas nasional.

Tabel 3.2 Perkiraan Realisasi APBD Lingkup Provinsi Jawa Timur s.d. Triwulan IV Tahun 2018

Uraian	Pagu	Realisasi s.d. Triwulan III Tahun 2018		Perkiraan Realisasi s.d. Triwulan IV Tahun 2018	
		Rp	% Realisasi Terhadap Pagu	Rp	% Realisasi Terhadap Pagu
Pendapatan Daerah	116.137,62	88.531,40	76,23	118.041,87	101,64
Belanja Daerah	110.416,37	58.223,94	52,73	111.595,89	101,07
Surplus / Defisit	5.721,24	30.307,46	529,74	6.445,99	112,67

Sumber : LRA Jatim Pemprov/Kab/Kota

IV. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)

A. LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN

Kanwil Ditjen Perbendaharaan menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) Tingkat Wilayah yang mengkonsolidasikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian di wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan untuk 39 Pemerintah Daerah.

**Tabel 4.1 Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian
Tingkat Wilayah Provinsi Jawa Timur s.d Triwulan III Tahun 2018 (dalam Juta Rupiah)**

Uraian	2018				2017
	Pusat	Daerah	Konsolidasi	Kenaikan	Konsolidasi
Pendapatan Negara	114.936.625	84.221.397	199.158.022	45,57%	136.814.290
Pendapatan Perpajakan	109.332.198	17.649.632	126.981.830	4,47%	121.544.628
Pendapatan Bukan Pajak	5.604.427	8.828.344	14.432.771	-2,11%	14.744.282
Hibah	-	487.747	487.747	235,46%	145.397
Transfer	-	57.255.674	57.255.674	0,00%	379.984
Belanja Negara	34.506.396	64.564.491	99.070.887	8,59%	91.233.344
Belanja Pemerintah	34.506.396	57.412.957	91.919.353	3,20%	89.070.524
Transfer	-	7.151.534	7.151.534	230,66%	2.162.820
Surplus / (Defisit)	80.430.229	19.656.906	100.087.135	119,58%	45.580.947
Pembiayaan	-	9.941.542	9.941.542	62,99%	6.099.455
Penerimaan Pembiayaan Daerah	-	10.318.318	10.318.318	58,98%	6.490.477
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	-	376.776	376.776	-3,64%	391.022
Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran	80.430.229	29.598.448	110.028.678	112,90%	51.680.402

Sumber: LKPK Kanwil DJPb Prov. Jatim

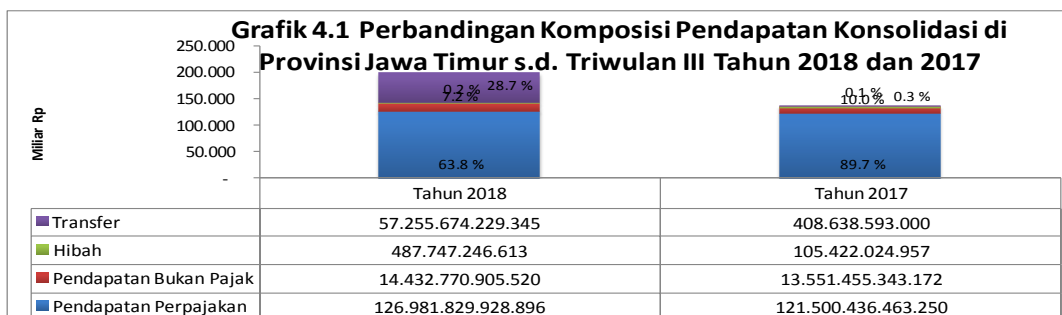
Realisasi Pendapatan Negara konsolidasi sampai dengan triwulan III tahun 2018, mengalami kenaikan dibanding tahun 2017 yang sebesar Rp62,34 triliun menjadi Rp199,15 triliun atau meningkat 45,57 persen. Dari sisi belanja, realisasi belanja negara konsolidasi 2018 mengalami kenaikan 8,59 persen dari Rp91,23 triliun di tahun 2017 menjadi Rp99,07 triliun.

Pada tahun 2018 surplus anggaran sebesar Rp100,09 triliun sedangkan di tahun 2017 surplus sebesar 45,58 triliun. Pembiayaan untuk tahun 2018 mengalami kenaikan dari Rp6,099 triliun di tahun 2017 menjadi Rp9,94 triliun atau mengalami kenaikan sebesar 62,99 persen.

B. PENDAPATAN KONSOLIDASIAN

Pendapatan Pemerintah Umum (*General Government Revenue*) atau Pendapatan Negara Konsolidasian di Wilayah Provinsi Jawa Timur sampai dengan triwulan III tahun 2018 sebesar Rp199,15 triliun atau mengalami kenaikan 45,57 persen dibanding periode yang sama tahun 2017.

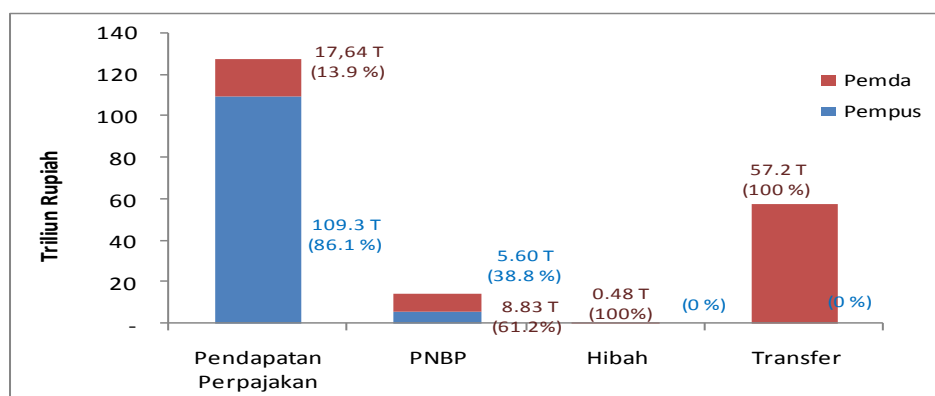
1. Analisis Proporsi dan Perbandingan



Sumber: LKPK Kanwil DJPb Prov. Jatim

Grafik di atas menggambarkan porsi per jenis pajak terhadap total Pendapatan Negara Konsolidasi. Pada Struktur Pendapatan Perpajakan Konsolidasian tahun 2018, porsi terbesar berasal dari Pendapatan Perpajakan sebesar Rp126,98 triliun atau 63,8 persen. Pendapatan Bukan Pajak menyumbang sebesar Rp14,43 triliun atau mengalami kenaikan dibanding tahun 2017 yang sebesar Rp13,55 triliun. Sedangkan untuk Pendapatan Hibah berkontribusi 0,2 persen dari total pendapatan atau sebesar Rp487,75 miliar

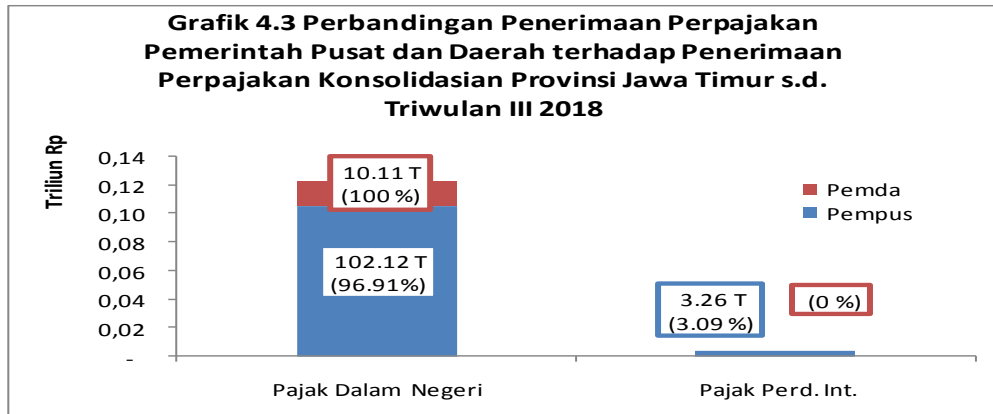
Grafik 4.2 Perbandingan Penerimaan Pemerintah Pusat dan Daerah terhadap Penerimaan Konsolidasian Provinsi Jawa Timur s.d Triwulan II Tahun 2018



Sumber: LKPK Kanwil DJPb Prov. Jatim

Struktur Pendapatan Perpajakan Konsolidasian Provinsi Jawa Timur sampai dengan triwulan III tahun 2018, Pendapatan Pemerintah Pusat hanya mendominasi untuk setiap jenis Pendapatan Perpajakan. Dari total Pendapatan Perpajakan Konsolidasian tahun 2018 sebesar Rp126,94 triliun, porsi pendapatan Pemerintah Pusat mencapai 86,1 persen atau sebesar Rp109,3 triliun, sedangkan pendapatan Pemerintah Daerah sebesar 13,9 persen atau sebesar Rp17,64 triliun. Untuk Pendapatan Bukan Pajak porsi Pemerintah Pusat sebesar 61,2 persen atau sebesar Rp8,83 triliun sedangkan porsi pendapatan pemerintah daerah 38,8 persen atau sebesar Rp5,60 triliun.

2. Analisis Perubahan



Sumber: LKPK Kanwil DJPb Prov. Jatim

Pemerintah Pusat masih mendominasi penerimaan jenis Pajak Dalam Negeri yang mencapai 96,91 persen atau sebesar Rp102,12 triliun sedangkan pemerintah daerah memberikan kontribusi sebesar 3,09 persen atau sebesar Rp 10,11 triliun. Untuk Pajak Perdagangan Internasional seluruhnya merupakan kontribusi dari Pemerintah Pusat sebesar Rp3,26 triliun.

3. Analisis Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kenaikan Realisasi Pendapatan Konsolidasian

Realisasi pendapatan sampai dengan triwulan III tahun 2018 sebesar Rp.126,98 memberikan dampak kenaikan terhadap PDRB yang sebesar Rp.496,94 triliun. Realisasi tahun 2018 sebesar 141,41 triliun naik sebesar 47,53 persen dibanding tahun 2017 yang sebesar Rp95,85 triliun

Tabel 4.2 Realisasi Pendapatan Konsolidasian Pempus dan Pemda di Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 dan Tahun 2018

Uraian	2017		2018	
	Realisasi	Kenaikan	Realisasi	Kenaikan
Penerimaan Perpajakan	85.705.504.720.204	807,35%	126.981.829.928.896	48,16%
PNBP	10.148.529.839.417	57,72%	14.432.770.905.520	42,22%
Total	95.854.034.559.621	503,61%	95.854.034.559.621	47,53%
PDRB /Pert. Ekonomi	472,78 T	13,09%	496,94 T	5,11%

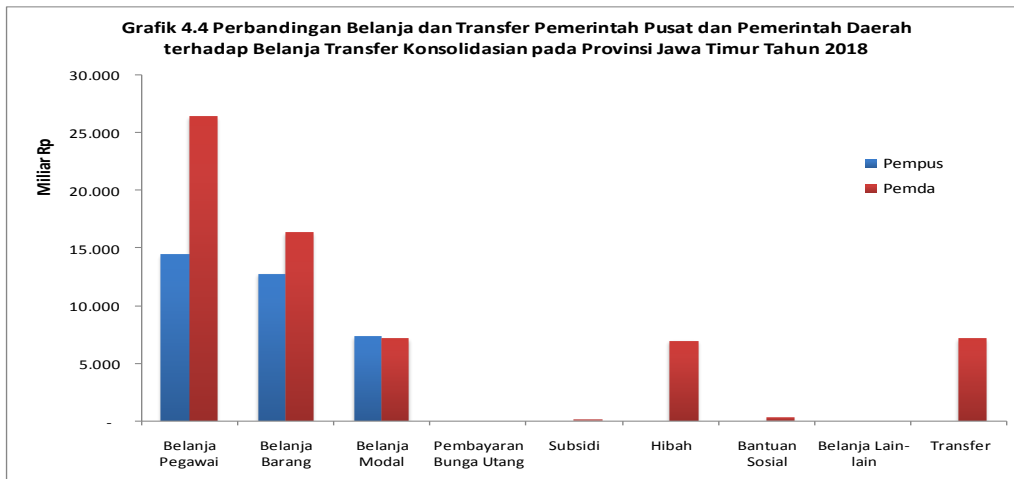
Sumber LKPK Kanwil DJPb Prov. Jatim

C. BELANJA KONSOLIDASIAN

Belanja Pemerintahan Umum (*General Government Spending*) atau Belanja Konsolidasian Tingkat Wilayah adalah konsolidasian antara seluruh belanja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah suatu wilayah dalam satu periode pelaporan yang sama, dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun resipokal (berelasi).

1. Analisis Proporsi dan Perbandingan

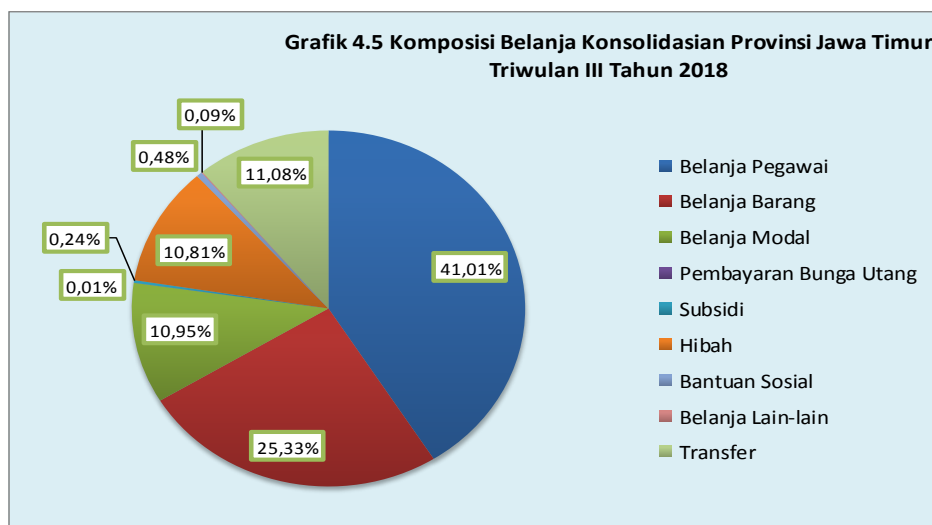
Belanja Pemerintah merupakan salah satu instrumen bagi pemerintah untuk melakukan stimulus fiskal, yaitu bagian dari kebijakan fiskal pemerintah yang ditujukan untuk mempengaruhi permintaan agregat untuk selanjutnya diharapkan akan berpengaruh pada aktivitas perekonomian dalam jangka pendek.



Dari Grafik di atas, dapat diketahui bahwa seluruh jenis belanja, porsi pengeluaran Pemerintah Daerah melebihi porsi pengeluaran Pemerintah Pusat. tak terduga porsi belanja Pemerintah Daerah sebesar 100 persen.

2. Analisis Perubahan

Menurut klasifikasi ekonomi, belanja pemerintah terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja lain-lain.



Sumber : LKPK Kanwil DJPb Provinsi Jatim

Porsi terbesar pada komposisi belanja konsolidasian Provinsi Jawa Timur sampai dengan triwulan III tahun 2018 adalah belanja pegawai sebesar 41,01 persen lebih besar dibanding periode yang sama tahun 2017 yang sebesar 41 persen. Belanja barang sebesar 25,33 persen lebih besar jika dibanding tahun 2017 sebesar 20 persen. Sedangkan untuk belanja modal sebesar 10,95 persen lebih rendah dibanding tahun 2017 yang sebesar 11 persen.

3. Analisis Dampak Kebijakan Fiskal kepada Indikator Ekonomi Regional

Kebijakan Fiskal pemerintah pusat dan daerah yang tertuang dalam alokasi anggaran dimaksudkan untuk mempengaruhi perekonomian, dalam hal ini untuk mempengaruhi permintaan agregat dan redistribusi pertumbuhan. Sektor konsumtif merupakan belanja pemerintah yang dikeluarkan untuk membiayai kebutuhan operasional pemerintah yang sifatnya rutin dan habis pakai yang *multiplier effect*-nya bersifat jangka pendek. Sedangkan sektor produktif merupakan pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk investasi mendanai kegiatan dalam rangka membentuk aset yang diharapkan menimbulkan *multiplier effect* yang berkelanjutan yang bersifat langsung dan tidak langsung.

Dengan porsi terbesar pada belanja konsolidasian Provinsi Jawa Timur sampai dengan triwulan III tahun 2018 adalah belanja pegawai kemudian diikuti belanja barang yang masing-masing sebesar 41,01 persen dan 25,33 persen, sedangkan porsi Belanja modal hanya 10,95 persen maka pemerintah berkontribusi lebih besar dalam pertumbuhan ekonomi jangka pendek. Agar pemerintah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang, perlu adanya kebijakan fiskal untuk meningkatkan porsi belanja modal.

D. ANALISIS KONTRIBUSI PEMERINTAH DALAM PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah adalah sebesar Rp99,07 triliun. Sedangkan PDRB provinsi Jawa Timur pada triwulan III tahun 2018 sebesar Rp569,39 triliun. Dengan demikian dapat diketahui bahwa kontribusi belanja Pemerintah terhadap PDRB adalah sebesar 17,39 persen. Sebagaimana diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi Jawa Timur triwulan III tahun 2018 ini melambat y to y sebesar 5,40 persen bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2017.

V. BERITA / ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH

A. Judul Isu Fiskal Regional Terpilih I

KPP Madya Optimis Tembus Target

Sidoarjo, KPP Madya Sidoarjo optimis mencapai target penerimaan pajak sebesar Rp 8,435 triliun pada tahun 2018. Dari data yang dihimpun saat ini capaiannya sudah menembus angka Rp 4,2 triliun atau 49,65 persen dari yang ditargetkan .

Kepala KPP Madya Sidoarjo Teguh Imam Wirotomo, Kamis (2/8) kemarin mengatakan, angka capaian saat ini prosentasinya hampir sama dengan tahun lalu. Menurutnya pada dua bulan terakhir biasanya pembayaran pajak dari wajib pajak (WP) akan meningkat. Untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan WP Teguh mengatakan pihaknya terus berupaya meningkatkan fasilitas layanan yang nyaman. Diantaranya tempat parkir khusus pengendara sepeda, ruang tunggu sopir dan *driver online*, tempat parkir prioritas, *kids corner*, *charging station*, perpustakaan, dan fasilitas minuman serta *internet* gratis. “Kalau mereka merasa nyaman tentu akan membayar pajak dengan baik,” katanya.

General Manager PT Integra Indo Cabinet TBK Kristina Yunita mengaku senang dengan layanan tersebut. “Dengan fasilitas komputer serta *internet* gratis semisal ada berkas kurang, tidak perlu kembali ke kantor,” ujarnya singkat.

Radar Sidoarjo -Jumat, 3 Agustus 2018

B. Judul Isu Fiskal Regional Terpilih II

Dongkrak Perolehan Pajak Dengan Layanan Digital

Surabaya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Surabaya optimistis bisa mengejar target perolehan pajak pada 2018 senilai 3,5 Triliun. Meningkatnya pembangunan pemukiman baru di kawasan barat jadi salah satu titik sentral masuknya nilai pajak yang bertambah besar.

Selain itu layanan pajak digital diharapkan mampu mendobrak perolehan karena memudahkan masyarakat dalam pembayaran pajak. Kepala BPKPD Yusron Sumartono mengatakan, saat ini perolehan pajak sudah mencapai RP 2,1 triliun. Nilai tersebut didominasi oleh pajak bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). “Kami tetap optimistis karena juga dibantu dengan pelayanan pajak digital,” katanya. Minggu (29/7).

Radar Surabaya -Senin, 30 Juli 2018